BAB II

BIOGRAFI KH. MASJKUR

A. Riwayat Hidup KH. Masjkur

KH. Masjkur lahir di Singosari, Malang, tahun 1900 M/ 1315 H.[1] Ia dilahirkan dari pasangan Maksum dengan Maemunah. Maksum adalah seorang perantau yang berasal dari sebuah dusun di kaki gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Ia datang ke Singosari memenuhi perintah ibunya untuk mencari ayahnya yang pergi meninggalkan kampung halaman.[2] Maksum sebagai anak laki-laki yang melajang masa remaja tidak hendak membantah perintah sang ibu. Baginya, apa yang diperintahkan ibundanya, merupakan suatu keharusan yang tak dapat dan tak perlu dibantah lagi.[3]

Pada masa itu, orang masih belum banyak yang berani ke luar kampung halaman, berdagang seorang diri, mengembara di kota orang. Namun ayah Maksum dan teman-temanya meninggalkan desa karena ikut dalam gerakan perlawanan terhadap Belanda.

Kemudian, di Singosari, Maksum tinggal di pesantren yang dipimpin kiai Rohim. Dan menjadi santri di pesantren tersebut. Dalam waktu yang singkat, Maksum sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang santri yang rajin, yang cerdas dan juga tekun serta suka menolong sesama rekannya. Karena itu tidak

---

[1] Soebagijo I.N, *K.H. Masjkur* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), 3.
[2] Azyumardi Azra (ed), *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: PPIM, 1998), 56.
[3] Sobagijo, *KH. Masjkur*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anehlah bahwa Maksum menjadi kesayangan kiai Rohim, sampai akhirnya dia diambil menantu oleh sang kiai, dikawinkan dengan anak perempuannya, Maemunah.

Pasangan Maksum dengan Maemunah inilah yang kemudian melahirkan Masjkur bersaudara. Mereka itu ialah: Masjkur (tertua), Toyib, Hafsah, Barmawi, Toha dan Hassan. Dalam perkembangannya, keenam bersaudara itu berhasil menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan Madinah.[4]

Sepulang haji, Masjkur memulai proses pendidikannya di dunia pesantren. Ia belajar pada tidak kurang dari tujuh pesantren terkemuka di berbagai daerah dengan konsentrasi keilmuan yang berbeda-beda.masjkur kecil diantarkan ayahnya ke pesantren Bungkuk Singosari, di bawah pimpinan kiai Thohir. Selesai belajar di pesantren Bungkuk, Masjkur pindah ke pesantren Sono, yang terletak di Bundaran Sidoarjo, untuk belajar ilmu sharaf dan nahwu. Empat tahun kemudian pindah ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, untuk belajar ilmu fikih. Selanjutnya, Masjkur pindah ke pesantren Tebuireng Jombang untuk belajar ilmu tafsir dan hadits pada kiai Hasyim Asy'ari selama dua tahun. Setelah menamatkan pelajaran di Tebuireng, Masjkur berangkat ke pesantren Bangkalan Madura untuk belajar qiraat al-Qur'an pada kiai Khalil selama satu tahun. Dan kemudian pindah ke pesantren Jamasaren di Solo.[5]

Selama itu pula, Masjkur mendapat pengalaman bahwa kehidupan di pesantren pada waktu dulu diatur sedemikian rupa oleh kiai masing-masing, sehingga para santri itu selalu saling tolong-menolong baik dalam hal rohani

---

[4] Mastuki H.S. at el. *Intelektualisme Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka,2003), 95.
[5] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun jasmani, lahir dan batin. Ada lagi suatu hal yang berhasil diamati Masjkur. Yakni bahwa para ulama pada masa dahulu sangat kuatnya semangat non-koperator terhadap musuh (Belanda), maka para santrinya tidak dibenarkan untuk meniru tingkah laku dan tabiat orang asing itu. Karenanya, menggunakan bahasa Belanda pun dilarang keras dan berpakaian sebagai orang Eropa sama sekali tidak dibenarkan.

Sedangkan pesantren yang memiliki makna tersendiri bagi Masjkur adalah pesantren Jamsaren, karena waktu itu sudah mulai menginjak masa dewasa. Di sini pula dia mulai berkenalan dengan teman-temannya yang dikemudian hari menjadi ulama terkenal dan pemimpin masyarakat di daerah masing-masing, seperti kiai Musta'in (Tuban), kiai Arwan (Kudus), kiai Abdurrahim (adik kiai Abdul Wahab Hasbullah, Jombang).[6]

Selain itu, di pesantren Jamsaren ini perkembangan berfikir Masjkur mengalami kemajuan pesat. Dia mulai menyadari bahwa umat Islam kalah maju dengan golongan lain, karena tidak dapat mengikuti zaman. Banyak di antara sesama rekannya santri yang hanya pandai menulis dan membaca huruf arab, tetapi tidak mampu membaca huruf latin. Padahal, ketika itu huruf latin sudah banyak di pelajari orang. Di sekolah-sekolah para murid sudah di beri pelajaran huruf latin, di samping huruf jawa. Buku-buku ilmu pengetahuan, yang berisi dongeng dan cerita banyak di tulis dalam huruf latin. Tetapi, semua itu bagi

[6] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang paham akan huruf latin pasti buku yang ia miliki hanya tertutup saja dan tidak ada artinya sama sekali.[7]

Karena itu tergeraklah hati Masjkur dan beberapa orang temannya santri di Jamsaren untuk belajar membaca dan menulis huruf latin. Dia mendengar kabar bahwa di kota ada seorang janda tua, berkebangsaan Indo-Belanda, mau dan bersedia mengajar mereka yang ingin membaca dan menulis latin. Begitulah Masjkur dan beberapa orang temannya mulai belajar dengan beberapa temannya tadi sampai akhirnya dia cukup mahir menulis dan membaca huruf latin.

Setelah dia menyelesaikan pelajaran di Jamsaren, Masjkur melanjutkan belajar di pesantren Kresek, Penyosokan Cibatu Jawa Barat, setahun lamanya.[8] Selama itu pula dia berhasil menjalin tali persahabatan dengan beberapa ulama terkemuka di sana seorang diantaranya ialah Jalil al-Muqadasih yang kemudian pindah ke Makkah, mendirikan madrasah di sana dan bermukim di Makkah sampai akhir hayatnya. Masjkur berkelana dan menjelajah tanah Priangan, berpindah-pindah dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain, membandingkan keadaan pondok yang satu dengan pondok yang lain dan setelah dia merasa puas serta cukup mengadakan penelitian, dia pun lalu pulang kembali ke Singosari, Malang, dengan membawa cita-cita serta gagasan yang mantap dan matang.

Setibanya kembali di kampung halaman, dia berniat hendak mengamalkan segala apa yang telah dipelajarinya dengan bertekad membangun pondok

[7] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 57.
[8] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren. Di sana dia hendak memberi pelajaran kepada anak-anak di sekitarnya terutama mengenai ajaran-ajaran agama.

Pada tahun1923 di Singosari dia mulai membuka pondok madrasah yang di beri nama *Misbachul Wathon*. Yang berarti pelita tanah air. Madarasah itu mula-mula masih sederhana saja, baru menerima beberapa murid laki-laki karena pada waktu itu memang belum lazim anak perempuan belajar mengaji di sekolah bersama dengan anak laki-laki.[9]

Dengan tekun serta telatennya madrasah yang didirikan itu dibinanya, meskipun dia tahu dengan pasti halangan dan rintangan pasti datang terutama dari pihak penguasa, yaitu asisten wedana atau camat setempat.

Hampir setiap hari Masjkur mendapat gangguan dan sering kali dipanggil untuk datang ke kantor kecamatan untuk ditanya pelajaran apa saja yang diberikan kepada murid-muridnya. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat setempat. Dan rakyat yang sebagian besar terdiri dari orang awam terpengaruh pula oleh keadaan yang demikian. Pada umumnya mereka takut mengirim anak-anaknya ke madrasah yang dipimpin oleh Masjkur.

Masjkur menyadari bahwa tiap usaha dan perjuangan selalu harus menghadapi tantangan. Dengan segala ketabahan dia berusaha agar madrasah yang dipimpinnya tetap bisa bertahan dan berdiri meskipun jumlah muridnya tidak begitu banyak. [10]Akhirnya kiai Masjkur meminta bantuan kepada kiai Wahab Hasbulloh. Dan Wahab Hasbulloh menganjurkan kepadanya, agar madrasahnya yang di Singosari diubah namanya dari *Misbachul Wathon* menjadi

[9] Ibid., 16.
[10] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madrasah *Nadhatul Wathon* (yang artinya kebangunan tanah air), sekaligus menjadi cabang *Nadhatul Wathon* dari Surabaya.[11]

Cara pengajian, cara pengajaran agama, cara penyampaian ajaran agama disesuaikan dengan kehendak zaman, dengan cara yang sudah lazim dilakukan madrasah *Nadhatul Wathon* Surabaya. Sekembalinya di Singosari dia pun menyatakan niatnya kepada para muridnya dan sejak saat itulah madrasah *Misbachul Wathon* berganti nama menjadi madrasah *Nadhatul Wathon*.

Kiai Wahab Hasbullah kemudian datang ke Singosari dan membawa Masjkur ke kantor kewedanan, sambil memberitahukan bahwa *Misbachul Wathon* sejak itu merupakan cabang dari *Nadhatul Wathon* di Malang. Sejak saat itu pihak alat pemerintah Belanda tidak lagi mengungkit-ungkit serta memanggil Masjkur agar datang ke kantornya. Dia kini dibenarkan bebas merdekan memberi pelajaran kepada muridnya, tidak mendapat gangguan atau rintangan.

Masjkur mengucap syukur dan perkembangan madrasah yang dipimpinnya mengalami kemajuan yang cukup. Masyarakat disekitar setelah tidak lagi melihat adanya adanya panggilan-panggilan oleh kantor kewedanan dan mulailah mereka berani mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah di madrasah itu.[12] Masjkur begitu penasaran dan menyelidiki penyebab dia tidak dipanggil lagi oleh pihak Belanda. Dan ternyata anggota pengurus *Nadhatul Wathon* Mas Sugeng adalah seorang sekretaris Pengadilan Tinggi Pemerintah Hindia Belanda.

Pada usia 27 tahun Masjkur menikah dengan cucu kiai Tohir di Bungkuk tempat pertama kali dia menjadi santri. Tetapi, waktu itu Haji Maksum meninggal

[11] Ibid., 19.
[12] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dan dengan sendirinya beban orang tua dilimpahkan kepada bahu Masjkur sebagai anak pertama. Dialah yang di tugaskan membesarkan, mengasuh dan mengawinkan adik-adiknya.[13]

Sejak kecil Masjkur sudah dididik untuk hidup sederhana dan dia menyaksikan sendiri bagaimana kedua orang tuanya hidup tirakat sepanjang ajaran Jawa dan agama Islam. Segala hasil kerja orang tuanya di pergunakan untuk kepentingan anak-anak agar mereka itu nanti dapat maju dalam kehidupan. Ajaran kedua orang tuanya itu diterapkan kepada adik-adiknya dan mereka di ajari hidup serba hemat, apa adanya, rajin dan tetap beribadah kepada tuhan.

Setelah 16 tahun hidup bersama dengan cucu kiai Thahir (istrinya). Masjkur ditinggal meninggal dunia tanpa diberi keturunan oleh istrinya. Pada tahun 1939, atas saran dari kiai Khalil dari Genteng, Masjkur menikahi adik almarhumah istrinya yang bernama Fatimah. Setahun kemudian, pada 1940 pasangan itu dikaruniai seorang putra yang diberi nama Syaiful Islam.[14]

B. Karir KH. Masjkur

Ketika masih di Singosari, Masjkur sudah aktif di Nadhatul Ulama sebagai ketua Cabang Malang, yang kala itu merupakan cabang ke 6. [15]Awal mula perkenalan Masjkur dengan Nadhatul Ulama terjadi ketika ia meminta nasehat kiai Wahab Hasbullah tentang adanya gangguan-gangguan dari pemerintah setempat terhadap pesantren yang dipimpinnya. Kiai Wahab menganjurkan agar Masjkur mengubah nama pesantrennya menjadi pesantren *Nadhatul Wathon* yang

[13] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 58.
[14] Mastuki, *Intelektualisme Pesantren*, 96.
[15] Saifudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan cabang dari *Nadhatul Wathon* Surabaya. Sejak saat itu Masjkur sering datang ke Surabaya untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok Taswirul Afkar yang membahas masalah agama, dakwah dan sosial.

Masjkur merasa memperoleh pengalaman baru dengan pertemuan tersebut. Ia berkenalan langsung dengan para pemimpin Taswirul Afkar, seperti kiai Mas Alwi, kiai Mas Mansur dan kiai Ridwan. Kelompok inilah yang kemudian memprakarsai keikutsertaan beberapa ulama "tradisional" dalam kongres Islam sedunia di Hijaz dan membidani lahirnya Nadhatul Ulama. Karena Masjkur sering terlibat dalam kelompok tersebut,dia pun ditunjuk menjadi ketua Nadhatul Ulama cabang Malang. Aktivitas Masjkur di Nadhatul Ulama semakin hari semakin meningkat. Pada 1938 Masjkur diangkat sebagai salah seorang Pengurus Besar Nadhatul Ulama yang bermarkas di Surabaya. Sejak itu, Masjkur hampir 12 tahun sering pulang pergi dari Malang ke Surabaya.[16]

Pada masa pendudukan Jepang, Masjkur terlibat dalam laskar hizbullah. Ia mengikuti latihan kemiliteran yang diadakan di Cisarua Bogor pada akhir Februari 1945. Selain itu Masjkur juga ikut latihan khusus bagi ulama yang diadakan Jepang pada Juli 1945. Masjkur saat itu menjadi utusan dari keresidenan Malang bersama dengan Haji Nuryasin dan H.M. Kholil. Selepas latihan, Masjkur diangkat menjadi anggota Syu Sangi-kai (semacam DPRD).[17]

Menjelang kemerdekaan, Masjkur diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bersama-sama Kahar Muzzakkir, Agus Salim dan Wahid Hasyim, ketika membahas

[16] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 18.
[17] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rancangan Undang-Undang Dasar, Masjkur termasuk anggota sidang yang mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara yang akan dibangun.

Saat pihak Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Segera setelah itu, barisan tentara suka rela lainnya dibentuk, kali ini hanya merekrut kalangan muslim saja, dan barisan ini diberi nama dengan hizbulloh (tentara Allah). Kelompok barisan ini adalah salah satu bagian Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam yang ada pada saat itu. Partai Masyumi membentuk komandonya sendiri yang disebut sebagai pembelaan. Pemimpin bagian ini dipercayakan kepada Masjkur yang juga sudah pengalaman memimpin hizbulloh pada masa Jepang.

Belakang Masjkur juga diangkat sebagai anggota Dewan Pertahana Negara. Masjkur dalam dewan tersebut adalah utusan Masyumi. Dewan Pertahanan Negara ini dibentuk Presiden karena dinyatakan negara dalam keadaan bahaya, setelah terjadi huru-hara dan bentrokan senjata di daerah Solo yang diikuti dengan culik menculik yang dinilai pemerintah menjurus kearah anarki. Dewan Pertahanan Negara terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Pertahan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Panglima Besar dan tiga orang wakil organisasi rakyat. Anggota-anggota Dewan Pertahanan Negara yang bukan menteri ialah Sarjono (PKI), Sumarso (Pesindo) dan kiai Haji Masjkur (hizbullah/Masyumi) sedangkan, yang menjadi sekretarisnya ialah Mr. Ali Sastroamijoyo.[18]

[18] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pertahanan Negara diberi kekuasaan dalam membuat peraturan-peraturan yang disamakan dengan undang-undang dan tindakan-tindakan lain tersebut.[19] Maksudnya ialah untuk memusatkan mengkoordinasi dan mempercepat jalannya pemerintahan.

Saat menjadi anggota Dewan Pertahanan Negara, tepatnya pada November 1947 Masjkur dipanggil Bung Karno untuk segera datang ke Yogyakarta.[20]

Setibanya di Yogyakarta Masjkur tidak langsung menuju ke Gedung Agung, tetapi terlebih dahulu datang ke kantor pusat Masyumi untuk melapor sekaligus mencari informasi tentang panggilan tersebut. Dari situlah, ia mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi kabinet Amir Syarifuddin akan mengadakan reshuffle dan Masyumi yang semula ditinggalkan akan diikutsertakan dalam kabinet. Mendengar informasi tersebut, Masjkur langsung menemui Bung Karno dan saat itu juga Masjkur diminta untuk menjadi Menteri Agama oleh Bung Karno dalam kabinet Amir Syarifuddin ke-2 yang mulai bertugas sejak 11 November 1947.

Dalam kondisi politik yang belum stabil dan perekonomian yang masih terpuruk, sebagai Menteri Agama, Masjkur hanya mendapat gaji Rp 300,- Oeang Republik Indonesia (ORI) dalam sebulan. Pada saat itu gaji tersebut hanya cukup dimakan sekeluarga antara lima sampai enam hari.

Setiap kali rapat kabinet, jamuannya hanya teh manis dan disediakan makan siang atau malam apabila sidang sampai lama. Namun hal itu tidak mengurangi semangat anggota kabinet untuk terus memikirkan strategi

[19] A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 3* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1977), 140-141.
[20] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjuangan melawan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.[21]

Dengan kondisi seperti itu, dapat dimaklumi jika pada masa kabinet Amir Syarifuddin kedua, Masjkur belum dapat melakukan pembenahan terhadap tugas dan fungsi Kementrian Agama seperti yang telah diamanatkan dalam Konferensi I (Rapat Kerja) Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada 17-18 Maret 1946.

Perhatian kabinet tercurah untuk menyiapkan perundingan dengan Belanda yang dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, yang kemudian menghasilkan perjanjian Renville. Ironisnya isi perjanjian tersebut justru memperlemah posisi Republik Indonesia.

Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa kedaulatan atas Hindia Belanda akan tetap di tangan kerajaan Belanda sampai pada saat nanti diserahkan ke Republik Indonesia Serikat. Selain itu, dalam perjanjian tersebut diakui pula adanya garis Van Mook (garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda). Dan yang lebih tragis lagi, pasukan dan laskar Republik Indonesia yang masih beroperasi di daerah-daerah haruslah hijrah ke Republik Indonesia. Dan barulah bisa diadakan dasar-dasar baru untuk meneruskan perundingan. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Februari 1948 dan mendapatkan reaksi keras dari berbagai golongan. Bahkan, anggota-anggota Masyumi dan PNI yang duduk di kabinet meletakkan jabatannya, sambil

[21] Soebagijo, *KH.Masjkur*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak ikut bertanggung jawab atas hasil perundingan Renville dan menuntut pergantian kabinet.[22]

Karena kabinet Amir Syarifuddin tidak mendapat dukungan dari Masyumi dan PNI, ia akhirnya meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 23 Januari 1948. Dengan demikian kabinet Amir Syarifuddin kedua hanya berjalan dua setengah bulan. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, Masjkur selaku Menteri Agama menghasilkan Peraturan Menteri Agama No. 5/ 1947 tentang biaya perkara Pengadilan Agama yang harus disetor ke kas negara. Dalam waktu itu, berlangsunglah Konferensi Agama dengan Jawatan-jawatan Agama seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 13-16 November 1947 yang menghasilkan keputusan penting yaitu ditambahkannya bagian Penyiaran dan Penerangan Agama di setiap Jawatan Agama.[23]

Dengan mundurnya Amir Syarifuddin, Presiden Soekarno menunjuk Hatta untuk memimpin kabinet presidensial darurat yang bukan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) melainkan kepada Bung Karno sebagai Presiden. Para anggota kabinet berasal dari golongan tengah, terutama terdiri dari PNI, Masyumi dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Pada awalnya orang-orang Masyumi ragu untuk duduk di Kabinet Hatta, karena trauma dengan perjanjian Renville. Di tubuh Masyumi sendiri terjadi pertentangan antara pro dan kontra untuk duduk di kabinet. Namun hal ini dapat diselesaikan berkat usaha yang dilakukan K.H. Wahab Chasbullah, sehingga akhirnya Masyumi mendukung

[22] Ibid., 76.
[23] Azra, *Menteri-Menteri Agama*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kabinet Hatta. Pada kabinet baru ini, Masjkur kembali ditunjuk sebagai Menteri Agama.[24]

Dalam kabinet yang dikenal dengan Kabinet Hatta I ini Masjkur memberlakukan UU NO. 19/ 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan yang salah satu pasalnya, 35 (2) menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antar umat Islam diperiksa dan diputuskan menurut hukum Islam oleh pengadilan dengan formasi satu orang ketua hakim beragama Islam, dan 2 orang anggota hakim yang ahli agama Islam. Demikian pula halnya dengan peradilan tingkat kasasi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53. Semua hakim yang dimaksudkan itu diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.[25]

Dalam menjalankan programnya, Kabinet Hatta I mendapatkan tantangan cukup berat dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menjadi oposisi dan beraliran komunis. Kelompok FDR ini mendapat dukungan Muso, seorang komunis berasal dari Rusia. Kelompok ini berusaha keras untuk dapat kembali memegang kemudi pemerintahan dengan berbagai cara. Dimana-mana mereka mengadakan rapat raksasa dan demonstrasi, meneriakkan tuntut-tuntutan agar Amir Syarifuddin diangkat kembali menjadi Perdana Menteri. Pucak aksi mereka adalah terjadinya perebutan kekuasaan di Madiun pada 19 September 1948. Pemberontakan ini telah merusak dan membakar tempat-tempat ibadah dan pesantren-pesantren, terutama di daerah Madiun, Magetan dan Ponorogo. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, Masjkur memerintahkan stafnya

[24] Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990), 311.
[25] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk sebuah tim untuk mengadakan penyelidikan serta pencatatan jumlah penghulu, naib, alim ulama dan pesantren yang menjadi korban keganasan kaum komunis. Selain itu, Kementerian Agama juga membentuk sebuah tim yang bersama-sama kementerian lainnya mengadakan perjalanan keliling ke berbagai daerah yang terkena dampak pemberontakan kaum komunis, khususnya Madiun dan Kediri.[26] Tim ini juga memberi penjelasan dan penerangan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan mengenai peristiwa yang baru terjadi, sekaligus menganjurkan ketahanan mental menghadapi kasus tersebut.[27]

Di Kediri, Masjkur menemui Kiai Abdul Kholik dan menginstruksikan agar membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kabupaten. Dalam sejarah Kementrerian Agama, KUA Kabupaten Kediri merupakan kantor pertama yang ada di Indonesia. Sebagai kepala KUA Kabupaten Kediri ditetapkan Kiai Mohammad Makhin, yang waktu itu penghulu kabupaten dan dibantu beberapa tenaga muda.[28] Di samping itu, Masjkur ditugaskan kabinet pergi ke Jawa Barat untuk menemui Kartosuwiryo, yang telah melepaskan diri dari Masyumi dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Usaha Masjkur menemui Kartosuwiryo gagal, karena tidak ada di tempat dan sengaja menghindari pertemuan dengan Menteri Agama.[29]

Tugas lain yang dijalankan Masjkur selaku Menteri Agama adalah berkunjung ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan orang-orang kepercayaannya di jalan cemara, Menteng. Pertemuan itu membahas cara-cara

---

[26] Ibid., 65.
[27] Saifullah Ma'shum, *Menapak Jejak, Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh NU* (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994), 184.
[28] Ibid., 185.
[29] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan senjata, membelinya dan mengangkutnya ke daerah pedalaman. Kunjungannya ke Jakarta ini juga dimanfaatkan Masjkur untuk melawat ke wilayah Serang dan Banten. Di daerah tersebut Masjkur menjelaskan perihal situasi saat itu, baik yang berkaitan dengan jalannya perundingan maupun mengenai tugas dan kewajiban rakyat untuk menjaga dan memperkokoh persatuan.[30]

Keberhasilan Republik Indonesia menumpas pemberontakan kaum komunis mengubah simpati Amerika yang semula samar-samar, yang didasarkan atas sentimen anti penjajahan, menjadi dukungan diplomatik yang didasarkan pada strategi global. Dukungan Amerika semakin terlihat nyata setelah Belanda melakukan agresi militer kedua pada 18 Desember 1948. Amerika menghentikan bantuan kepada Belanda yang dialokasikan untuk keperluan di Indonesia. Aksi militer kedua sebetulnya merupakan bencana militer dan politik bagi Belanda, meski tampaknya mereka memperoleh kemenangan.[31]

Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta berhasil diduduki Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia sengaja membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik.

Soekarno, Hatta, Agus Salim dan seluruh anggota Kabinet ditangkap Belanda, kecuali beberapa orang yang tidak ada ditempat. Masjkur adalah salah seorang menteri yang lolos dari penyergapan Belanda. Ia meloloskan diri dari belakang rumahnya dengan membawa putra tunggalnya, Syaiful yang masih kecil.

---

[30] Ibid., 84-85.
[31] Ibid., 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak saat itu, Masjkur mulai bergerilya. Mula-mula ia pergi ke wilayah Kauman. Di sana ia menemui seorang pegawai Kementerian Agama yang ditugaskan memberitahu orang di rumah bahwa Masjkur dan Syaiful selamat dan hendak pergi ke luar kota untuk bergerilya.[32]

Perjalanan dilanjutkan ke arah Solo, kemudian ke Ponorogo. Setibanya di Ponorogo Masjkur diikuti oleh 12 anggota tentara pelajar. Bersama dengan pasukannya Masjkur singgah di Pondok Gontor selama beberapa hari untuk mencari informasi mengenai tokoh-tokoh pemerintahan yang juga bergerilya. Di Gontor, Masjkur bertemu dengan Menteri Susanto. Rencananya mereka ingin bergabung untuk bergerilya, tetapi Masjkur agak keberatan atas pertimbangan strategis dengan rombongan kecil akan lebih baik dari pada rombongan besar.

Setelah beristirahat di Gontor, Masjkur dan pasukannya meneruskan perjalanan ke daerah Trenggalek. Di daerah ini ia bertemu dengan Harsono Cokroaminoto (penasehat Panglima Besar Sudirman waktu itu), yang akhirnya mempertemukan Masjkur dengan Jenderal Sudirman.

Sejak itu pasukan Masjkur bergabung dengan pasukan Panglima Sudirman. Tiga hari setelah mengikuti Jendral Sudirman, di daerah Pacitan Menteri Agama beserta pasukannya memisahkan diri. Kemudian Masjkur pergi ke arah Barat menuju kota Yogyakarta. Selama menjedi Menteri Agama sampai masa gerilya tersebut, ada beberapa kebijakan penting yang diambil Masjkur.[33]

---

[32] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 66.
[33] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bidang Pendidikan.

   Masjkur mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 2/ 1948 tentang bantuan kepada perguruan agama.

2. Bidang Haji.

   Masjkur mengirimkan misi haji ke tanah suci Makkah di bawah pimpinan KH. Adnan. Misi ini adalah misi haji pertama setelah perang dunia kedua, sebelumnya misi haji Indonesia dihentikan pemerintah dengan keluarnya Maklumat Kementerian Agama No. 4/ 1947 tentang penghentian ibadah haji di masa perang.

3. Bidang Perkawinan.

   Dalam bidang perkawinan ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Masjkur yaitu:

   a. Penetapan Menteri Agama No. 1/ 1948 yang mencabut penetapan Menteri Agama No. 7/ 1947, tentang penambahan biaya NTR Rp 10,- untuk kas masjid (75%) dan kaum (25%).
   b. Peraturan Menteri Agama No. 3/ 1948 tentang penyetoran biaya pencatatan NTR oleh naib kepada penghulu kabupaten. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Agama No. 2/1947 pasal 2 (1).[34]

Dengan Penetapan Presiden No. 6/ 1949, tertanggal 4 Agustus 1949, PDRI berarti bubar dan pemerintahan berada di tangan kabinet Hatta, yang kemudian dikenal dengan Kabinet Hatta II. Dengan Penetapan Presiden tersebut, Kabinet Hatta mengalami berbagai perubahan karena ada menteri yang diresshuffle,

[34] Ibid., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengundurkan diri dan berpindah jabatan. Natsir adalah salah seorang menteri yang mengundurkan diri karena tidak setuju dengan hasil perjanjian Roem-Royen.[35]

Sementara Syarifuddin Prawiranegara yang dalam Kabinet Hatta I menjadi Menteri Kemakmuran, dalam Kabinet Hatta II menjadi wakil Perdana Menteri. Dalam Kabinet Hatta II ini, Masjkur tetap dipercaya menjadi Menteri Agama.[36] Sejak Kabinet Hatta II ini, Kementerian Agama memasuki awal periode restaurasi yaitu periode penyusunan kembali organisasi, baik di pusat maupun di daerah, setelah mengalami kerusakan dan pemusnahan. Kabinet Hatta II ini kemudian diganti dengan kabinet Peralihan pimpinan Perdana Menteri Mr. Susanto Tirtoprodjo berdasarkan Keppres-RIS No. 2 tahun 1949 yang berlaku efektif mulai 20 Desember 1949 sampai 24 Januari 1950. Sekali lagi, dalam kabinet yang hanya berusia sekitar satu bulan ini, Masjkur ditunjuk sebagai Menteri Agama.[37]

Dalam periode yang singkat ini dikeluarkan peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 tentang lapangan pekerjaan (tugas-tugas) Kementerian Agama. Berdasarkan peraturan pada 24 Desember 1949 ini, Kementerian Agama mempunyai program kerja yaitu:

1. Melaksanakan asas ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.

[35] Azra, *Menter-Menteri Agama RI*, 69.
[36] Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, 352.
[37] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran agama yang sehat.
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah negeri.
5. Menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan agama lain.
6. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pelajaran rohani kepada anggota tentara, asrama, rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
7. Mengatur, mengerjakan dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam.
8. Memberikan bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat untuk beribadat (masjid, gereja dan lain-lain).
9. Mengerjakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
10. Menyelidiki, menentukan mendaftar dan mengawasi pemeliharaan wakaf.
11. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.[38]

[38] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guna mengantisipasi masalah kepegawaian yang mungkin timbul sebagai akibat pendudukan wilayah RI oleh Belanda, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 1/ 1950, tertanggal 13 Januari 1950, yang berkenaan dengan masalah kepagaiwan. Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa kedudukan pegawai berdasarkan Maklumat Menteri Agama RI No. S/ 2 tahun 1949, yang bekerja dan menerima sokongan dari pemerintah pendudukan dianggap bukan pegawai lagi. Namun mereka masih dapat diterima kembali sebagai pegawai RI jika berada di tempat, dengan jalan mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama di atas kertas bermaterai Rp 75,- dengan ketentuan tidak diberi kedudukan dan gaji lebih tinggi dari kedudukan dan gaji sebelum tanggal 19 Desember 1949.

Sesudah kabinet peralihan itu, pemerintah RI, sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat, berada di tangan kabinet baru yang dipimpin Perdana Menteri A. Halim. Dalam kabinet ini, Menteri Agama dijabat KH. Faqih Usman, menggantikan posisi Masjkur yang telah sakit-sakitan akibat bergerilya. Pada saat yang sama terbentuk pula pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang kabinetnya dipimpin Muhammad Hatta dengan Menteri Agama KH. Wahid Hasyim.[39]

Masjkur yang pada saat itu telah sakit-sakitan beristirahat di kampung halamannya hingga datang surat panggilan dari KH. Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama dalam Kabinet Natsir. Surat panggilan itu berisi perintah agar Masjkur datang ke Jakarta karena ada pembicaraan mengenai tugas yang sangat penting. Masjkur ditugaskan untuk mengadakan kunjungan kerja ke seluruh

[39] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Tujuannya adalah membuka kantor-kantor agama di seluruh penjuru tanah air. Dalam menjalankan tugas ini Masjkur ditemani KH. Fakih Usman. Tugas Masjkur dalam hal ini bukan hanya mendirikan kantor-kantor agama, tetapi juga mengangkat pegawai dan memberi petunjuk apa dan bagaimana mengelola kantor agama.[40]

Pada saat Masjkur menduduki posisi Ketua Umum PBNU, ia ditunjuk Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menjadi Menteri Agama yang mewakili NU. Masjkur menjabat Menteri Agama menggantikan KH. Fakih Usman berdasarkan Keppres No. 123/ 1953, terhitung sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Usaha-usaha perbaikan dalam tubuh Kementerian Agama di bawah pimpinan Masjkur terus dilanjutkan. Rencana-rencana ke arah itu dituangkan dalam Konferensi Dinas Kementerian III di Tretes Jawa Timur, pada 25-30 Juni 1955. Namun, tak lama kemudian mengalami penggantian pimpinan, sehingga rencana-rencana tersebut tidak dapat dijalankan.[41]

Struktur organisasi kementerian agama tidak mengalami perubahan. Struktur organisasi dan lapangan pekerjaan Kementerian Agama masih sama dengan masa KH. Fakih Usman, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 jo Peraturan Menteri Agama No. 9, 10, 31 dan 39 tahun 1952. Adapun beberapa kebijakan Masjkur sewaktu memimpin Kementerian Agama dalam periode ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan.

Kebijakan Menteri Agama Masjkur mengenai pendidikan di antaranya berupa:

---

[40] Saifullah Ma'shum, *Menapak Jejak*, 186.
[41] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perubahan masa belajar PGA menjadi 6 tahun yang dibagi dua:
   1. Bagian pertama, dari kelas I s/d IV: 4 tahun.
   2. Bagian atas, dari kelas V s/d VI: 2 tahun.
b. Dengan penetapan Menteri Agama Np. 109 tanggal 19 Mei 1954, terhitung mulai 1 juni 1954, SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) bagian A (bahasa), bagian B (ilmu pasti) dan bagian C (agama) berangsur-angsur dihapus. Sedang bagian D (Hukum Agama) dijadikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) di Yogyakarta. Perubahan terakhir ini dilakukan atas dasar penetapan Menteri Agama No. 14/ 1954.
c. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan maka dilakukan:
   1. Usaha persiapan pelaksanaan wajib belajar dilingkungan Kementerian Agama.
   2. Pelaksanaan pengajaran Agama pada sekolah-sekolah umum berdasarkan keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Agama.
   3. Menjadikan pondok pesantren sebagai sasaran pendidikan yang perlu dipertahankan.

2. Bidang Perkawinan.
   a. Mengadakan P3NTR di desa-desa seluruh daerah luar Jawa dan Madura, dengan Penetapan Menteri Agama No. 14/ 1955.
   b. Semua petugas P3NTR diwajibkan untuk melaksanakan UU No. 22/ 1946 jo UU No. 32/ 1954, yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1/ 1955.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang Haji.

Mengenai bentuk paspor haji, diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 3/ 1955 dan mengenai cara-cara penyetoran ongkos haji serta perubahan-perubahan akomodasi penumpang kapal dengan Penetapan Menteri Agama No. 4/ 1955 dan No.5/ 1955.

Mengenai tugas dan kewajiban MPH dan kedudukan penasehat MPH diatur dengan Penetapan Menteri Agama No. 8/ 1955. Sedangkan mengenai susunan rombongan haji diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 13/ 1955.

4. Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.

Bersama dengan Departemen Dalam Negeri Masjkur mengeluarkan pernyataan tentang berlakunya maklumat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Maklumat bersama tersebut berisi tentang Peraturan Kaum dan Rois (PKR) di luar Jawa.[42]

Setelah tidak lagi menjadi Menteri Agama karena Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh, ada satu kasus yang belum diselesaikan Masjkur. Semasa dia menjabat Menteri Agama, diberitakan di media ibukota bahwa Menteri Agama Masjkur melakukan manipulasi kain kafan sebanyak satu juta yard. Berita itu menggegerkan masyarakat. Masjkur sendiri menanggapi berita tersebut dengan tenang dan sabar karena ia yakin bahwa berita itu disiarkan dengan tujuan menjelekkan pribadinya dan menjatuhkan partai yang diwakilinya, bahkan

[42] Ibid., 73-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan Kabinet Ali Sastroamidjojo.[43] Sampai kabinet Ali jatuh, kasus itu belum dapat diselesaikan tuntas. Baru pada awal Desember 1955 pihak Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan bahwa setelah diadakan pemeriksaan-pemeriksaan teliti dan mendalam di sekitar soal pembagian kain kafan dalam Kementerian Agama sebanyak lebih kurang satu juta yard dan menurut berita-berita yang tersiar telah terjadi kekusutan dan kecurangan di dalamnya, maka pihak Kejaksaan Agung kini telah mengambil keputusan, menganggap tidak ada alasan untuk mengadakan sesuatu tuntutan terhadap diri mantan Menteri Agama, Masjkur.

Tidak lama setelah menjabat Menteri Agama, Masjkur mendapatkan tugas dari Sekretariat Negara untuk menyertai Ibu Haryati Soekarno menunaikan ibadah haji bersama dengan rombongan ibu-ibu lainnya. Sebelum menjalankan tugas, Masjkur mengajukan syarat agar istrinya juga diizinkan menyusul ke Tanah Suci. Istri dan anaknya menyusul bersama rombongan di bawah pimpinan Kiai Wahab. Di sanalah Masjkur bertemu keluarganya. Selesai menunaikan ibadah haji, rombongan ibu Haryati pulang ke Indonesia, sedang Masjkur dan keluarganya tinggal beberapa hari di Mekkah kemudian mengunjungi Mesir, Libanon, Irak dan Iran. Selesai melakukan perjalanan ia pulang ke Indonesia melalui Hongkong, Jepang dan Filipina.[44]

Pada masa Kabinet Ali II diadakan pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (Konstituante) yang akan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara. Masjkur adalah salah satu anggota Konstituante. Sebagaimana

---

[43] Soebagijo, *KH. Masjkur*, 178.
[44] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui, terjadi perdebatan sengit dalam sidang Konstituante mengenai masalah dasar negara. Sebagian anggota, yakni kalangan Islam, mengusulkan agar dasar negara Indonesia adalah Islam mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim: sebagain lain, kalangan nasionalis, menolak usulan tersebut dengan alasan heterogenitas agama yang dipeluk masyarakat Indonesia, perdebatan yang sama pernah terjadi sepuluh tahun sebelumnya ketika BPUPKI bersidang. [45]

Pada masa Orde baru Masjkur aktif di DPR. Ia pernah menjadi Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada masanya terjadi perdebatan keras tentang RUU Perkawinan. Umat Islam banyak melakukan demonstrasi dan protes terhadap RUU yang di anggap bertentangan dengan hukum Islam tersebut. RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi UU no. 1 tahun 1974, setelah mengalami perubahan penting di sana-sini.[46]

Selain itu, Masjkur juga menjabat Ketua Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), yang diembannya hingga akhir hayat. Pada 18 Desember 1992, Masjkur dipanggil menghadap sang pencipta dalam usia 92 tahun.[47]

---

[45] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), 82.
[46] Azra, *Menteri-Menteri Agama RI*, 78.
[47] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id